



Pengaruh Penerapan Dimensi *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

Julie Abdullah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Gorontalo
Email: julieabdullah99@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the effect of dimensional Value For Money to the public accountability at the Department of Health Pohuwato. As for the background of this study because of the negative phenomena that occur in the application of the dimensions of value for money that is stronger demands for accountability by the public on public institutions, both at central and local levels. Application of dimension value for money is very necessary both to manage and use resources owned by the organization as well as a form of public sector organizations to the public over the public resources entrusted to the organization.

In addition, low-dimensional application value for money causes decreased levels of government accountability and increase the risk of investment and reduce the ability to compete with other public sector organizations were similar.

Keywords: Value For Money, Accountability

1. PENDAHULUAN

Value for money dibagi menjadi dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengelolaan sumber daya. Dimensi ekonomis dan efisiensi bertujuan untuk menentukan: (1) apakah suatu entitas telah memperoleh, melindungi, dan menggunakan sumber dayanya (seperti karyawan, gedung, dan peralatan kantor) secara hemat (ekonomis) dan efisiensi, (2) penyebab ketidakhematan dan ketidakefisienan, dan (3) apakah entitas tersebut telah mematuhi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kehematan dan efisiensi. Dimensi efektivitas bertujuan untuk menentukan tingkat pencapaian hasil program, efektivitas pelaksanaan program, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pelaksanaan program. Oleh karena itu, dalam penerapannya *value for money* memiliki tujuan utama, (Mulyadi, 2002: 39).

Tujuan utama *value for money* adalah menjamin dilakukannya pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga pemerintah kepada masyarakat, yang sering disebut dengan akuntabilitas publik. Akuntabilitas

dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik, (Mardiasmo, 2005: 16).

Pada dasarnya, bentuk pertanggungjawaban/akuntabilitas yang dilaksanakan secara periodik adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Pemerintah baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu, hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya. Oleh karena itu, akuntabilitas publik dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu (1) akuntabilitas vertikal dan (2) akuntabilitas horizontal. Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat luas. Tak lepas dari itu pula, terdapat suatu dimensi *value for money* untuk mendukung terlaksananya akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal. Oleh karena itu, organisasi sektor publik dituntut untuk meningkatkan penyelenggaraan akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal ini dalam rangka mewujudkan penerapan dimensi *value for money*, (Mardiasmo, 2005: 19).

Penerapan *value for money* yang menekankan pada dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas dalam penggunaan dan pengembangan sumber daya publik saat ini masih menjadi sorotan masyarakat. Hal ini disebabkan sebagian besar masyarakat menilai bahwa pemerintah daerah pada khususnya belum mampu menerapkan dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas tersebut dalam melakukan pengelolaan keuangan dan sumber daya publik yang dimiliki untuk pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itu, masih terdapat fenomena negatif dalam rangka penerapan dimensi *value for money* sektor publik untuk proses terwujudnya akuntabilitas kepada masyarakat.

Menurut Renyowijoyo (2008: 19), fenomena negatif yang terjadi dalam penerapan dimensi *value for money* adalah menguatnya tuntutan akuntabilitas oleh masyarakat atas lembaga-lembaga publik, baik di pusat maupun daerah. Penerapan dimensi *value for money* sangat perlu dilakukan baik untuk mengelola dan menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi tersebut serta sebagai bentuk pertanggungjawaban organisasi sektor publik kepada masyarakat atas sumber daya yang dipercayakan masyarakat kepada organisasi. Oleh karena itu, jika masyarakat menilai pemerintah daerah tidak *accountable* masyarakat dapat menuntut pergantian pemerintahan, pergantian pejabat, dan pergantian struktur pemerintahan, yang pada akhirnya dapat menyebabkan konflik antara masyarakat dan pemerintah.

Konflik ini disebabkan pemerintah merasa memiliki kekuasaan dalam sistem politik pemerintahan sedangkan masyarakat merasa memiliki hak memilih dan memberhentikan kepemimpinan pemerintah yang tidak *accountable*. Oleh karena itu, rendahnya penerapan dimensi *value for money* menyebabkan tingkat akuntabilitas pemerintah menurun dan meningkatkan risiko berinvestasi serta mengurangi kemampuan berkompetisi dengan organisasi sektor publik lainnya yang sejenis. Fenomena yang dijelaskan oleh Renyowijoyo di atas juga termasuk fenomena yang terjadi pada salah satu organisasi sektor publik yang peneliti jadikan objek penelitian, yakni Dinas

Kesehatan Kabupaten Pohuwato. Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dianggap masih belum sepenuhnya ekonomis, efisiensi, dan efektif menggunakan sumber daya dan mengelola keuangannya. Oleh karena itu, Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato merupakan salah satu instansi pemerintah daerah yang masih tergolong rendah dalam penerapan dimensi *value for money* untuk meningkatkan akuntabilitas publik.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk melihat keterpengaruhannya antara penerapan dimensi *value for money* terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

2. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori

Agoes (2004: 155), mengemukakan bahwa *value for money* merupakan konsep pengelolaan yang didasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisiensi, dan efektivitas. Ekonomi adalah pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi merupakan pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang terendah untuk mencapai *output* tertentu. Efektivitas adalah tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana, efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.

Lebih lanjut lagi Suharto (2005: 121), mendefinisikan *value for money* sebagai nilai untuk uang yang digunakan untuk menilai apakah sebuah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa dalam sumber daya yang tersedia untuk itu. Ini tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan campuran kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, kebugaran untuk tujuan, ketepatan waktu dan kenyamanan untuk menilai 3 aspek yakni: ekonomis, efektivitas, dan efisiensi.

Artinya *value for money* adalah istilah yang digunakan untuk menilai apakah organisasi telah memperoleh manfaat maksimal dari barang dan jasa dalam sumber daya yang tersedia. Ini tidak hanya mengukur biaya barang dan jasa, tetapi juga memperhitungkan kualitas, biaya, penggunaan sumber daya, ketepatan waktu dan kenyamanan untuk menilai nilai barang dan jasa. *Value for money* memiliki tiga aktivitas utama, yaitu: ekonomi, efisiensi dan efektivitas, (Imperial College London, 2010).

Lebih lanjut menurut Mulyadi (2002: 111), manfaat implementasi konsep *value for money* pada organisasi sektor publik antara lain: a) meningkatkan efektivitas pelayanan publik dalam arti pelayanan yang diberikan tepat sasaran, b) meningkatkan mutu pelayanan publik, c) menurunkan biaya pelayanan publik karena hilangnya inefisiensi dan terjadinya penghematan dalam penggunaan *input*, d) alokasi belanja yang lebih berorientasi pada kepentingan publik, e) meningkatkan kesadaran akan uang publik (*public cost awareness*) sebagai akar pelaksanaan akuntabilitas publik.

2.2 Pengembangan Hipotesis

Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai: penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta ekonomis dalam menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul di atas digunakan dalam akuntabilitas publik sebagai dimensi ekonomis, sedangkan kualitas pelayanan sebagai upaya pemenuhan

kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan masyarakat, (Tjiptono, 2010).

Pendanaan kewenangan yang diserahkan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dapat dilakukan dengan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan Pusat-Daerah dan antar Daerah. Implikasi langsung pendelegasian kewenangan dan penyerahan dana tersebut adalah kebutuhan untuk mengatur hubungan keuangan antara Pusat-Daerah dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan oleh pemerintah daerah. Undang-Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara mengatur antara lain pengelolaan keuangan daerah dan pertanggungjawabannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraannya pemerintah daerah dituntut lebih responsif, transparan, dan akuntabel terhadap kepentingan masyarakat dengan menerapkan dimensi ekonomis dalam penggunaan dan pengelolaan sumber dana, (Effendy, 2009). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H1 : Penerapan dimensi ekonomis dalam *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Agoes (2004: 157), menjelaskan bahwa efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio *output* dan *cost*. Pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dapat menyelenggarakan dan meningkatkan pencapaian akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat. Menurut Mardiasmo (2005: 181), efisiensi mengacu pada rasio terbaik antara *output* dengan biaya (*input*). Oleh karena *output* dan biaya diukur dalam unit yang berbeda, maka efisiensi dapat terwujud ketika sumber daya yang dapat dicapai dengan sumber daya yang sekecil-kecilnya. Oleh karena organisasi telah berlaku secara efisien dalam menjalankan program aktivitasnya, maka dapat mendorong organisasi tersebut untuk bersedia mempertanggungjawabkan proses pelaksanaan program aktivitasnya tersebut kepada pihak eksternal.

Mardiasmo (2002: 29), juga mengemukakan bahwa indikasi keberhasilan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terciptanya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan, serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadaan tersebut hanya akan tercapai apabila lembaga sektor publik dikelola dengan memperhatikan konsep efisiensi, dalam rangka pertanggungjawaban baik kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat.

Hal senada juga disampaikan oleh Kurniawan(2010), yang mengemukakan bahwa dalam konteks otonomi daerah, prinsip efisiensi merupakan jembatan untuk menghantarkan pemerintah daerah mencapai *good governance*, yang salah satu indikatornya adalah akuntabilitas publik. Prinsip efisiensi tersebut harus dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan dan penggunaan sumber daya yang dimiliki oleh organisasi untuk meningkatkan akuntabilitas publik kepada masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H2 : Penerapan dimensi efisiensi dalam *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

Efektivitas memiliki arti berhasil atau tepat guna. Efektivitas merupakan kata dasar, sementara kata sifat dari efektivitas adalah efektif. Menurut Effendy (2009), mendefinisikan bahwa efektivitas sebagai komunikasi yang prosesnya mencapai tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang dianggarkan, waktu yang ditetapkan, dan jumlah personil yang ditentukan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap publik. Efektivitas menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam rangka untuk pertanggungjawaban atas sumber daya yang dipercayakan.

Mahmud (2010), mengemukakan bahwa pertanggungjawaban/akuntabilitas publik dapat tercapai dengan baik apabila pemerintah dapat menggunakan dan mengelola aktivitas sumber daya secara efektif. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Efektivitas lebih memfokuskan pada akibat atau pengaruh. Lebih lanjut menurut Tanjung (2006) dalam bukunya Menuju Pemerintahan *good governance*, mengungkapkan efektivitas mencakup kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan dan pengelolaan sumber daya organisasi. Tingkat efektivitas itu sendiri dapat ditentukan oleh terintegrasinya sasaran dan kegiatan organisasi secara menyeluruh, kemampuan adaptasi dari organisasi terhadap perubahan lingkungannya. Mengacu pada penjelasan di atas, maka untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif perlu adanya harmonisasi kemampuan sumber daya dengan menggunakan sarana yang lain sehingga sasaran yang akan dicapai menjadi jelas. Pencapaian sasaran tersebut dapat dikatakan efektif apabila adanya keharmonisan.

Tak lepas dari itu pula, pertanggungjawaban atas aktivitas pelaksanaan program setiap pegawai dalam organisasi sangat menentukan bagi pencapaian hasil kegiatan seperti yang telah direncanakan terlebih dahulu. Oleh karena itu, faktor keefektifitasannya banyak mempengaruhi pada kemampuan aparatur dan organisasi dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya. Tingkat pencapaian tujuan aparatur dalam suatu organisasi dikatakan efektif apabila pencapaian itu sesuai dengan tujuan organisasi dan memberikan hasil yang bermanfaat, (Deis dan Giroux, 2010). Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H3 : Penerapan dimensi efektivitas dalam *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas publik.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian penjelasan (*explanatory research*) yakni kausalitas menjelaskan suatu hubungan antara variabel-variabel melalui pengujian hipotesis (Ghozali, 2004).

Jenis penelitian ini dipilih mengingat tujuan yang hendak dicapai mencakup usaha-usaha untuk menjelaskan hubungan dan pengaruh yang terjadi antar kuisioner sebagai alat pengumpul data primer.

Analisis regresi yang digunakan adalah analisis regresi berganda, oleh karena dalam penelitian ini hanya digunakan satu variabel terikat (akuntabilitas publik) dan tiga variabel bebas (dimensi ekonomis, dimensi efisiensi, dan dimensi efektivitas). Model yang akan dibentuk sesuai dengan tujuan penelitian adalah :

$$Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + \varepsilon$$

- Y : Variabel dependen (Akuntabilitas Publik).
 X₁ X₂ X₃ : Variabel independen (Penerapan Dimensi *Value for Money*).
 b₁ b₂ b₃ : Angka arah atau koefisien regresi.
 a : *Intercept* atau konstanta.
 ε : Error

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1 Analisis Regresi Berganda

a. Koefisien Determinasi

Pengaruh variabel independen Ekonomis (X₁), Efisiensi (X₂) dan Efektivitas (X₃) secara simultan terhadap Akuntabilitas Publik dapat dilihat pada *Print Out SPSS* pada Tabel *Model Summary*, Pada nilai *R Square* seperti tertera pada tabel 1 berikut ini :

Tabel 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.949(a)	.901	.891	.770	1.540

a Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS, EKONOMIS, EFISIENSI

b Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa besarnya nilai koefisien determinasi atau *R Square* (R²) sebesar 0,901. Angka tersebut memiliki makna bahwa variabilitas variabel Akuntabilitas Publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuato, dapat dijelaskan oleh dimensi ekonomis, efisiensi, dan efektivitas sebesar 90,1%. Sedangkan sisanya sebesar 9,9% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Nilai R yang menunjukkan korelasi secara bersama – sama ekonomis (X₁), efisiensi (X₂), dan efektivitas (X₃) terhadap Akuntabilitas Publik sebesar R = 0,949 yang mendekati 1 memberikan makna korelasi antara ekonomis (X₁), efisiensi (X₂), dan efektivitas (X₃) terhadap akuntabilitas publik sebesar 0,949. Hal ini berarti terdapat hubungan yang sangat erat karena nilai R mendekati 1.

b. Uji Signifikansi Simultan (Uji Statistik F)

Pengujian hipotesis uji F digunakan untuk mengetahui apakah secara simultan atau bersama – sama variabel bebas mempunyai pengaruh yang bermakna terhadap variabel terikat.

Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS versi 21 diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel 2 berikut ini.

Tabel 2. Uji Signifikansi Secara Simultan

ANOVA(b)						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	151.362	3	50.454	85.066	.000(a)
	Residual	16.607	28	.593		
	Total	167.969	31			

a Predictors: (Constant), EFEKTIVITAS, EKONOMIS, EFISIENSI

b Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK

Berdasarkan tabel diatas hasil uji ANOVA (*Analysis of Variance*) di peroleh nilai F_{hitung} sebesar 85,066 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, maka terbukti variabel bebas ekonomis (X_1), efisiensi (X_2) dan efektivitas (X_3) secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik (Y). Dengan demikian model regresi dapat menjelaskan variabel bebas secara bersama – sama berpengaruh terhadap akuntabilitas publik pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

c. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji Statistik t)

Untuk menentukan pengaruh masing – masing variabel bebas terhadap variabel terikat di gunakan uji t. Hasil pengujian dengan menggunakan program SPSS diperoleh hasil sebagaimana dalam tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Uji Parsial
Coefficients(a)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	3.096	1.120		2.764	.010		
	EKONOMIS	.493	.119	.538	4.124	.000	.208	4.812
	EFISIENSI	.829	.155	.860	5.334	.000	.136	7.369
	EFEKTIVITAS	.457	.183	.439	2.496	.019	.114	8.761

a Dependent Variable: AKUNTABILITAS PUBLIK

Dari tabel di atas dapat diketahui pengujian signifikansi secara parsial pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat sebagai berikut;

1. Pengaruh ekonomis terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa ekonomis berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, keputusan ini diambil berdasarkan kriteria dimana nilai signifikansi untuk ekonomis terhadap kinerja pengelolaan keuangan adalah bernilai 0,000, nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian terdapat pengaruh signifikan ekonomis terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

2. Efisiensi terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Hasil perhitungan statistik pada tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi pengaruh efisiensi terhadap akuntabilitas publik sebesar 0,000 lebih kecil dari $\alpha = 0,05$. Hal ini menunjukkan terdapat pengaruh signifikan efisiensi terhadap akuntabilitas publik pada Pengujian hipotesis untuk membuktikan bahwa efisiensi berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

3. Pengaruh efektivitas terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa efektivitas berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato, keputusan ini diambil berdasarkan kriteria dimana nilai signifikansi untuk efektivitas terhadap akuntabilitas publik adalah bernilai 0,019, nilai signifikansinya lebih kecil dari nilai $\alpha = 0,05$, dengan demikian terdapat pengaruh signifikan efektivitas publik terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

d. Persamaan Regresi Berganda

Berdasarkan tabel 3 di atas koefisien persamaan regresi yang terbentuk sebagaimana pada kolom *Standardized Coefficients Beta*, maka persamaan regresi ganda yang dihasilkan adalah:

$$Y = 3,096 + 0,493X_1 + 0,829X_2 + 0,457X_3$$

Persamaan regresi yang diperoleh dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Nilai konstanta (a) = 3,096, memberikan makna jika ekonomis (X_1), efisiensi (X_2), dan efektivitas (X_3) bernilai 0, maka terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato akan konstan pada nilai 3,096.

2. Nilai koefisien regresi ekonomis (b_1) bernilai positif yaitu 0,493, memberikan arti bahwa setiap peningkatan skor ekonomis sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato sebesar 0,493, dengan asumsi efisiensi (X_2) dan efektivitas (X_3) dalam keadaan tetap.

3. Nilai koefisien regresi efisiensi (b_2) bernilai positif yaitu 0,829, memberikan arti bahwa setiap peningkatan skor efisiensi sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato sebesar 0,829, dengan asumsi ekonomis (X_1) dan efektivitas (X_3) dalam keadaan tetap.

4. Nilai koefisien regresi efektivitas (b_3) bernilai positif yaitu 0,457, memberikan arti bahwa setiap peningkatan skor efektivitas sebesar satu satuan akan meningkatkan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato

sebesar 0,457, dengan asumsi ekonomis (X_1) dan efisiensi (X_2) dalam keadaan tetap.

4.2. Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Ekonomis Terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan nilai koefisien 0,538 dengan $t_{hitung} = 4,124$ dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan ekonomis terhadap akuntabilitas publik. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi ekonomis, maka akuntabilitas publik akan semakin baik.

Hipotesis pertama menyatakan bahwa ekonomis berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dapat di terima. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Tjiptono, 2010 bahwa Lembaga Administrasi Negara mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai: penyelenggaraan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta ekonomis dalam menjaga kesinergisan interaksi yang konstruktif di antara domain-domain negara, sektor swasta, dan masyarakat. Oleh karena itu, permasalahan yang timbul di atas digunakan dalam akuntabilitas publik sebagai dimensi ekonomis, sedangkan kualitas pelayanan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, serta ketepatan penyampaian layanan untuk mengimbangi harapan masyarakat.

Hasil penelitian ini, juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhi Suwardi, (2010) bahwa dimensi ekonomis berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian secara empiris dan didukung dengan pernyataan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin memperkuat bahwa hipotesis pertama yang menyatakan terdapat pengaruh positif ekonomis terhadap akuntabilitas publik terbukti. Artinya jika ekonomis dapat ditingkatkan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

4.2.2 Pengaruh Efisiensi terhadap Akuntabilitas Publik.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan nilai koefisien 0,860 dengan $t_{hitung} = 5,334$ dan nilai signifikansi 0,000 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan efisiensi terhadap akuntabilitas publik. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin baik efisiensi, maka akuntabilitas publik akan semakin meningkat.

Hipotesis kedua menyatakan bahwa efisiensi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dapat di terima. Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat yang di kemukakan oleh Agoes (2004: 157), menjelaskan bahwa efisiensi atau daya guna adalah bertindak dengan cara meminimalkan kerugian dalam penggunaan sumber daya ekonomi. Jadi efisiensi ini diukur dari rasio *output* dan *cost*. Pengelolaan keuangan dan sumber daya organisasi dengan menerapkan prinsip efisiensi dapat menyelenggarakan dan meningkatkan pencapaian akuntabilitas organisasi baik kepada pemerintah pusat maupun kepada masyarakat.

Hasil penelitian ini, juga didukung oleh peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Wardhi Suwardi, (2010) bahwa dimensi efisiensi berpengaruh terhadap peningkatan akuntabilitas publik pada Perusahaan Daerah Air Minum Kota Bandung.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian secara empiris dan didukung dengan pernyataan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin memperkuat bahwa hipotesis kedua yang menyatakan terdapat pengaruh positif efisiensi terhadap akuntabilitas publik telah terbukti. Artinya jika efisiensi dapat ditingkatkan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

4.2.3 Pengaruh Efektivitas terhadap Akuntabilitas Publik.

Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan perhitungan statistik, menunjukkan nilai koefisien 0,439 dengan $t_{hitung} = 2,496$ dan nilai signifikansi 0,019 lebih kecil dari tingkat signifikansi $\alpha = 0,05$, hal ini berarti bahwa terdapat pengaruh signifikan efektivitas terhadap akuntabilitas publik. Bahwa adanya pengaruh positif tersebut berarti semakin tinggi efektivitas, maka akuntabilitas publik akan semakin baik.

Hipotesis ketiga menyatakan bahwa efektivitas berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato dapat diterima. Hasil penelitian ini telah sesuai dengan yang dikemukakan oleh Mahmud (2010), mengemukakan bahwa pertanggungjawaban/ akuntabilitas publik dapat tercapai dengan baik apabila pemerintah dapat menggunakan dan mengelola aktivitas sumber daya secara efektif. Efektivitas menggambarkan seluruh siklus *input*, proses dan *output* yang mengacu pada hasil guna daripada suatu organisasi, program atau kegiatan yang menyatakan sejauhmana tujuan (kualitas, kuantitas, dan waktu) telah dicapai, serta ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Hal ini berarti, bahwa pengertian efektivitas yang dipentingkan adalah semata-mata hasil atau tujuan yang dikehendaki.

Hasil ini, juga sejalan hasil penelitian yang dikemukakan oleh Abbas Mahmud (2010) bahwa efektivitas adalah salah satu elemen utama dalam sistem pengelolaan pemerintahan yang baik (*good governance*), yang salah satu indikator utamanya adalah akuntabilitas publik pada Pemerintah Kota Blitar.

Dari penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa hasil penelitian secara empiris dan didukung dengan pernyataan pakar dan peneliti sebelumnya, maka semakin memperkuat bahwa hipotesis ketiga yang menyatakan terdapat pengaruh positif efektivitas terhadap akuntabilitas publik. Artinya jika efektivitas ditingkatkan, maka akan berimplikasi terhadap peningkatan akuntabilitas publik Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

5. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) Hasil pengujian hipotesis pertama diterima, artinya dimensi ekonomis (X_1) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato; (2) Hasil pengujian hipotesis kedua diterima, artinya dimensi efisiensi (X_2) berpengaruh positif terhadap akuntabilitas publik (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato; (3) Hasil pengujian hipotesis ketiga diterima, artinya

dimensi efektivitas (X_3) berpengaruh positif akuntabilitas publik (Y) pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. 2004. *Pengantar Akuntansi Sektor Publik dan Auditing*. Jakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Deddy Supriadi Bratakusumah, dan Dadang Solihin, Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Fatchurrochman, Agam, 2002. *Managemen Keuangan Publik, Materi Pelatihan Anti Korupsi*, Indonesian Corruption Watch, Jakarta.
- Ghozali Imam, 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*, Edisi 4, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Halim, 2001. *Managemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta UPP YKP
- Halim, Abdul dan Theresia. 2007. *Manajemen Keuangan Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi kedua*. Yogyakarta : UPP STIM YKPN.
- Hudana, Revy Septhian. 2011. *Pengaruh Audit Kinerja Sektor Publik dan Independensi Auditor terhadap Akuntabilitas Publik*. Skripsi. UNIKOM. Bandung
- Jogiyanto, 2004. *Metodologi Penelitian Bisnis. Salah Kaprah dan Pengalaman – Pengalaman*, BPFE, Jorjakarta.
- Mahoney, Thomas A., Thomas H. Jerdee, and Stephan J. Carrol, 1963, *Development of Managerial Performance a Research Approach*, Soutwestern Publishing
- Mardiasmo. 2002. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta: Andi.
- Mas'ud Fuad, 2004. *Survei Diagnosis Organisasional Konsep dan Aplikasi*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Noordiawan, Putra, Rahmawati, 2007. *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat, Jakarta.
- Renyowijoyo, Muindro. 2008. *Akuntansi Sektor Publik Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana.
- Riduwan. 2008. *Metode Dan Tehnik Menyusun Tesis, cetakan keenam*. Bandung: Alfabeta.
- Singarimbun, Masri. 2001 “Metode dan Proses Penelitian”, dalam Masri Singarimbun dan Sofian Efendi (eds.) *Metode Penelitian Survei*. Jakarta: LP3ES.
- Sugiyono. 2011. *Statistika Untuk Penelitian, Cetakan ke-19*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto, Harry. 2005. *Compliance Audit Pemerintah Daerah*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tanjung, Hafiz. 2006. *Menuju Pemerintahan Good Governance*. Bandung: Alfabeta.
- Umar Husein, 2003. *Riset Akuntansi Terapan*, Galia Indonesia, Jakarta.
- Ulum, Ihyaul, M.D (2009). *Audit Sektor Publik Suatu Pegantar*. Jakarta: Bumi Aksara